



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: https://inspektoratpessel@yahoo.co.id

NOTA DINAS

Untuk : Yth. Bupati Pesisir Selatan
Dari : Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 700.1.2.1/ 855 /INSP/2025
Tanggal : 21 Maret 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, maka Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 terhadap seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMOR dan TGL LHE	NILAI	PREDIKAT
1	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	700.1.2.1/812/INSP/2025 21 Maret 2025	90,43	AA
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	700.1.2.1/824/INSP/2025 21 Maret 2025	89,54	A
3	Dinas Pertanian	700.1.2.1/827/INSP/2025 21 Maret 2025	89,50	A
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	700.1.2.1/826/INSP/2025 21 Maret 2025	88,91	A

5	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	700.1.2.1/845/INSP/2025 21 Maret 2025	88,61	A
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	700.1.2.1/847/INSP/2025 21 Maret 2025	88,41	A
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	700.1.2.1/846/INSP/2025 21 Maret 2025	88,24	A
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	700.1.2.1/813/INSP/2025 21 Maret 2025	87,20	A
9	Dinas Perhubungan	700.1.2.1/844/INSP/2025 21 Maret 2025	85,93	A
10	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	700.1.2.1/848/INSP/2025 21 Maret 2025	85,31	A
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	700.1.2.1/817/INSP/2025 21 Maret 2025	84,38	A
12	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	700.1.2.1/839 /INSP/2025 21 Maret 2025	82,70	A
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700.1.2.1/834/INSP/2025 21 Maret 2025	81,97	A
14	Dinas Perikanan dan Pangan	700.1.2.1/837/INSP/2025 21 Maret 2025	81,60	A
15	Inspektorat Daerah	700.1.2.1/823/INSP/2025 21 Maret 2025	80,85	A
16	Dinas Kesehatan	700.1.2.1/835/INSP/2025 21 Maret 2025	80,81	A
17	Kecamatan Silaut	700.1.2.1/842/INSP/2025 21 Maret 2025	80,38	A
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	700.1.2.1/836/INSP/2025 21 Maret 2025	80,21	A
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	700.1.2.1/825/INSP/2025 21 Maret 2025	80,04	A
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	700.1.2.1/816/INSP/2025 21 Maret 2025	79,46	BB
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.1.2.1/814/INSP/2025 21 Maret 2025	79,42	BB
22	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	700.1.2.1/828/INSP/2025 21 Maret 2025	79,26	BB
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	700.1.2.1/815/INSP/2025 21 Maret 2025	78,55	BB
24	Sekretariat Daerah	700.1.2.1/833/INSP/2025 21 Maret 2025	77,12	BB
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	700.1.2.1/838/INSP/2025 21 Maret 2025	76,53	BB

26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	700.1.2.1/822/INSP/2025 21 Maret 2025	75,91	BB
27	Kecamatan Pancung Soal	700.1.2.1/841/INSP/2025 21 Maret 2025	75,60	BB
28	Kecamatan Lengayang	700.1.2.1/830/INSP/2025 21 Maret 2025	74,04	BB
29	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	700.1.2.1/818/INSP/2025 21 Maret 2025	70,68	BB
30	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	700.1.2.1/832/INSP/2025 21 Maret 2025	70,12	BB
31	Kecamatan IV Jurai	700.1.2.1/849/INSP/2025 21 Maret 2025	69,50	B
32	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	700.1.2.1/821/INSP/2025 21 Maret 2025	69,37	B
33	Kecamatan Koto XI Tarusan	700.1.2.1/840/INSP/2025 21 Maret 2025	68,06	B
34	Kecamatan Linggo Sari Baganti	700.1.2.1/820/INSP/2025 21 Maret 2025	67,96	B
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700.1.2.1/843/INSP/2025 21 Maret 2025	67,67	B
36	Kecamatan Airpura	700.1.2.1/851/INSP/2025 21 Maret 2025	66,54	B
37	Kecamatan Lunang	700.1.2.1/852/INSP/2025 21 Maret 2025	63,72	B
38	Kecamatan Bayang	700.1.2.1/820/INSP/2025 21 Maret 2025	62,00	B
39	Kecamatan Sutera	700.1.2.1/850/INSP/2025 21 Maret 2025	54,01	CC
40	Kecamatan Ranah Pesisir	700.1.2.1/831/INSP/2025 21 Maret 2025	52,35	CC
41	Kecamatan Batang Kapas	700.1.2.1/819/INSP/2025 21 Maret 2025	51,71	CC

2. Penilaian atas 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui beberapa dokumen antara lain dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen AKIP itu sendiri, didapati hal-hal yang masih merupakan kelemahan dari beberapa Perangkat Daerah. Penilaian komponen dasar ini dapat disimpulkan:

a. Perencanaan Kinerja:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah disusun oleh semua perangkat daerah yaitu Renstra, IKU, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan DPA.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
- 3) Perencanaan Kinerja sebagian besar telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja:

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan dan sudah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran Kinerja sebagian besar telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dimana pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja.
- 3) Pengukuran Kinerja telah sebagian besar telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward dan Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Pelaporan Kinerja:

- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
- 3) Pelaporan Kinerja sebagian besar telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- 4) Efisiensi penggunaan sumber daya secara umum masih berupa data sisa anggaran, belum menyajikan tingkat efisiensi sumber daya terhadap pencapaian kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
- 3) Implementasi SAKIP sebagian besar telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Disarankan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk memerintahkan:

1. Semua Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti rekomendasi Tim Evaluasi terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah masing-masing demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Instansi yang berwenang Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar memberikan sosialisasi secara berkala kepada semua Perangkat Daerah tentang penyusunan dokumen yang berkaitan dengan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah sehingga semua Perangkat Daerah mempunyai persepsi yang sama dalam menyusun dokumen yang berkaitan dengan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah tersebut.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan ini disampaikan kepada Bapak sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, terima kasih.



HELLEN HASMEITA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Bambina Tk 1
NIP. 19780528 200501 2 004